

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hubungan antara pemerintah daerah dan rakyat merupakan hubungan antara *agent* dan *principal*. Pemerintah daerah merupakan *agent* sedangkan rakyat merupakan *principal*. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menjalankan tugas pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan memunggut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat kemudian membelanjakannya untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada rakyat. Pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan akan mempertanggungjawabkan kepada rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut dituangkan dalam laporan keuangan (Sukri, 2017).

Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah ditujukan antara lain untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat (KSAP, 2005 dalam Wau dan Ratmono, 2015). Transparansi dan akuntabilitas dapat efektif apabila informasi yang disajikan relevan dan dapat diakses oleh semua pihak. Undang-undang telah mengamanatkan setiap pemerintahan pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meskipun pemerintah telah menyampaikan laporan keuangan kepada DPR sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan, namun laporan keuangan

tersebut belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu kendala mengingat jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas (Wau dan Ratmono, 2015).

Pemerintah dapat menggunakan media internet untuk menyajikan dan melakukan diseminasi laporan keuangannya dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Pina *et. al*, 2010 dalam Wau dan Ratmono, 2015). Apabila informasi keuangan pemerintah dapat diakses masyarakat maka masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi program-program pemerintah serta menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangannya. Penyampaian informasi keuangan melalui internet (*Internet Financial Reporting* yang disingkat menjadi IFR) merupakan cara yang murah dan efektif (*cost effective*) bagi pemerintah daerah untuk menyajikan informasi tentang pengelolaan keuangan (Styles dan Tennyson, 2007 dalam Wau dan Ratmono, 2015).

Faktor pertama yang mempengaruhi keteraksesan *internet financial report* adalah ukuran pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Faktor kedua yang mempengaruhi keteraksesan *internet financial report* adalah pendapatan per kapita. Masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi pada suatu daerah akan meningkatkan kapasitas dari kebutuhan akan akuntabilitas pemerintah (Ingram, 1984 dalam Hadianto dan Murtin, 2022). Menurut Styles and Tennyson (2007) dalam Wau dan Ratmono (2015) daerah yang masyarakatnya memiliki pendapatan tinggi akan

mempunyai tingkat pengawasan politik yang tinggi oleh masyarakat dan otomatis akan meningkatkan permintaan mengenai informasi kinerja dari pemerintah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi keteraksesan *internet financial report* adalah *leverage*. *Leverage* yang tinggi akan menuntut pemerintah untuk menyediakan media pengawasan bagi kreditur untuk mengawasi penggunaan dana yang dipinjam serta memonitor kesanggupan pemerintah dalam melunasi utang. *Internet Financial Reporting* dapat menjadi media pengawasan yang tepat yang dapat disediakan oleh pemerintah bagi kreditur karena dapat diakses dimana saja dan kapan saja (Nufus dkk, 2019).

Faktor keempat yang mempengaruhi keteraksesan *internet financial report* adalah opini audit. Pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) cenderung mengungkapkan laporan keuangannya melalui media internet guna membuktikan mutu atas pengelolaan laporan keuangannya yang baik serta bisa dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, pemerintah daerah yang memperoleh opini audit selain WTP cenderung tidak mengungkap laporan keuangannya sebab khawatir akan muncul kesan buruk dari publik mengenai adanya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan daerah (Moehardiono dan Yuliati, 2021).

Putra dan Syofyan (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran pemerintah, pendapatan per kapita dan *leverage* terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat). Hasil penelitian yakni ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap keteraksesan *internet financial*

report sedangkan pendapatan per kapita dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial report*.

Penelitian Wau dan Ratmono (2015) menunjukkan kemandirian finansial pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap keteraksesan IFR pada website pemerintah daerah. Kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, pendapatan per kapita dan opini tidak berpengaruh terhadap keteraksesan IFR pada website pemerintah daerah. Hasil penelitian Perdana dan Achmad (2018) menyimpulkan bahwa kekayaan pemerintah daerah, kompetisi politik, opini audit, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap aksesibilitas IFR pada pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan meneliti mengenai pengaruh ukuran pemerintah, pendapatan per kapita, *leveraged* dan opini audit terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah. Penelitian akan dilakukan pada kabupaten dan kota di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 juga menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) antara lain penyajian informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah daerah. Saat ini akses internet mudah didapatkan serta biaya untuk mengakses internet murah. Kemudahan akses internet diharapkan meningkat akses *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah. Banyak faktor yang diduga mempengaruhi keteraksesan *internet financial report* yaitu ukuran pemerintah daerah, pendapatan per kapita,

leverage dan opini audit. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu:

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah?
2. Apakah pendapatan per kapita berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah?
4. Apakah opini audit berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pendapatan per kapita berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui *leverage* berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui opini audit berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi penelitian mengenai pengaruh ukuran pemerintah, pendapatan per kapita, *leverage* dan opini audit terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah.

2. Kontribusi Praktek

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah sehingga dapat memudahkan masyarakat dan pihak lain mengakses laporan keuangan pemerintah daerah dan menciptakan transparansi akuntabilitas yang efektif.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini terdiri dari teori agensi, laporan keuangan pemerintah daerah, *internet financial reporting*, ukuran pemerintah, pendapatan per kapita, *leverage*, opini audit, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini terdiri dari obyek penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, model penelitian, jenis data, cara pengumpulan data dan sumber data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Analisis Data

Pada bab ini terdiri dari hasil analisis data serta pembahasan hasil analisis data.

Bab V : Penutup

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran penelitian.